

Dinamika Gender Dalam Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta

Gender Dynamics in the Program Keluarga Harapan in Yogyakarta City

Alya Fitri Rahayu¹, Hardian Wahyu Widiyanto²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 19-07-24

Diperbaiki 23-07-24

Disetujui 25-07-24

Kata Kunci:

Gender, Perempuan,
Program Keluarga
Harapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika gender dalam kegiatan pemberdayaan perempuan melalui Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta dengan menggambarkan adanya gap antara konstruksi gender di masyarakat dengan tujuan pembangunan yang berorientasi kesetaraan gender serta memahami proses dan bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPM PKH perempuan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada Koordinator, Pendamping, dan KPM PKH Kota Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah dan website pemerintah. Teknik keabsahan data dilakukan dengan melakukan triangulasi sumber data, member checking, dan peer debriefing. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika gender dalam PKH di Kota Yogyakarta tidak mengubah peran gender dalam keluarga secara keseluruhan. PKH dinilai memberikan dampak positif bagi KPM dalam kehidupan rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, meskipun keterlibatan laki-laki dalam program sedikit. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan mengenai Undang-undang atau peraturan tentang kesetaraan dalam penerima bantuan PKH. Serta memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dapat dikembangkan menjadi sebuah penelitian yang menganalisis suatu kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dilihat dari sudut pandang gender.

ABSTRACT

Keywords:

Gender, Women, Program
Keluarga Harapan

This research aims to determine gender dynamics in women's empowerment activities through the Program Keluarga Harapan in Yogyakarta City by describing the gap between gender construction in society and development goals oriented towards gender equality and understanding the process and form of decision making carried out by female KPM PKH in Yogyakarta City .

This research is qualitative research with a descriptive approach. Primary data was obtained through interviews with the Yogyakarta City PKH Coordinator, Facilitator and KPM. Secondary data was obtained from scientific journals and government websites. Data validity techniques are carried out by triangulating data sources, member checking, and peer debriefing. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data, presenting data and verifying.

The results of this research show that gender dynamics in PKH in Yogyakarta City do not change gender roles in the family as a whole. PKH is considered to have a positive impact on KPM in domestic life and women's empowerment, even though men's involvement in the program is small. This research provides policy recommendations regarding laws or regulations regarding equality in recipients of PKH assistance. As well as providing benefits for the government as material for evaluating implementation,

it can be developed into research that analyzes an economic empowerment policy seen from a gender perspective.

1. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi isu krusial pada beberapa negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Menurut data (BPS, 2023), Jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa dengan persentase sebesar 9,57%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,2 juta jiwa atau 0,03% terhadap Maret 2022 dan menurun sebesar 0,14% poin terhadap September 2021. Sementara itu, garis kemiskinan pada September 2022 sebesar Rp 535.547.00 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 397.125.00 dengan persentase 74,15% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 138.422.00 dengan persentase 25,85% [1]. Persentase penduduk miskin tersebut merupakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

Penomorduaan perempuan masih menjadi isu yang dialami oleh perempuan yang didukung oleh minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang bersifat formal di ruang publik yang semakin menguatkan peran perempuan dalam pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik menjadi sebuah hal yang membatasi perempuan dalam meningkatkan strata ekonomi atau bahkan dalam mengakses fasilitas publik yang semakin mempersempit pembatasan perempuan dalam mengontrol hak milik melalui legitimasi kekeluargaan maupun adat dan berpotensi menyebabkan penajaman stratifikasi sosial berdasar gender, pembatasan tersebut diperkuat dengan menguatnya peluang laki-laki dalam mengakses pekerjaan dan partisipasinya di sektor publik [2].

Kemiskinan perempuan menjadi suatu peninjauan penting dalam pembangunan yang didasarkan pada asumsi bahwa perempuan merupakan golongan rentan dan dapat menyebabkan masalah struktural dan memiliki dampak Panjang [3]. Isu gender dan kemiskinan menjadikan rumah tangga sebagai sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan (Noerdin, et al, 2006) dalam [3]. Subordinasi pada perempuan bermula dari dalam rumah, yang berkaitan dengan interaksi perempuan dengan suaminya atau dengan ayah dan saudara laki-lakinya.

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan Program Keluarga Harapan sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan. PKH sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH dan telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2007. PKH memberikan fasilitas bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) khususnya ibu hamil dan anak-anak untuk memanfaatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, PKH ditujukan untuk penyandang disabilitas dan lansia untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial. Penerima PKH akan mendapatkan bantuan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial dan telah menjalankan kewajibannya sebagai penerima PKH [4].

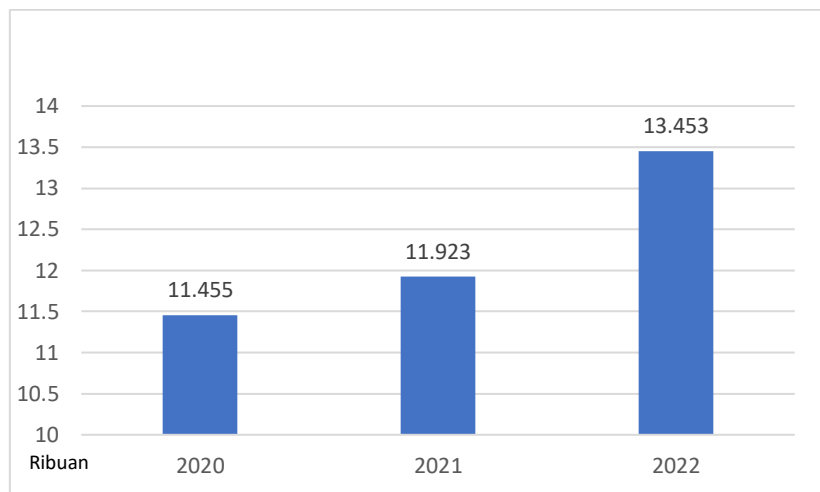
Penerima bantuan PKH di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sejumlah 13.453 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021 dengan jumlah penerima 11.923 KPM dan tahun 2020 sebanyak 11.455 KPM. Berikut grafik kenaikan penerima bantuan

Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta selama tiga tahun terakhir (Buku Profil Tahun 2023, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta).

Tabel 1. Jumlah Penerima PKH Tahun 2022 di Kota Yogyakarta

Kemantren	Jumlah	Kemantren	Jumlah
Wirobrajan	1.167	Ngampilan	649
Kraton	622	Mantrijeron	1.251
Gondomanan	578	Mergangsan	1.198
Pakualaman	310	Umbulharjo	1.854
Tegalrejo	1.403	Kotagede	979
Jetis	1.042	Danurejan	592
Gondokusuman	1.016	Gedongtengen	792

Implementasi PKH di Kota Yogyakarta berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) PKH yang memadai dan berkualitas. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penguatan kepada pendamping PKH guna memberikan semangat bagi pendamping PKH supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik di Kota Yogyakarta. Meskipun implementasi PKH di Kota Yogyakarta berjalan dengan baik, tetapi kemiskinan disana masih tergolong tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 29,68 ribu jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu sebesar 34,07 ribu jiwa. Meskipun angka kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan, nyatanya penerima Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta justru mengalami kenaikan, Kenaikan tersebut menandakan bahwa belum tuntas dan optimalnya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta.



Gambar 1. Huruf kapital hanya pada awal kalimat

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2023

PKH yang menjadikan perempuan sebagai mitra kebijakan memberikan sebuah agenda rutin bulanan yaitu Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

(P2K2 guna memberikan pemberdayaan kepada KPM khususnya perempuan untuk bisa meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam mengelola kehidupan sehari-harinya dan mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan melibatkan pemilihan solusi, alokasi sumber daya, serta pelaksanaan program yang dapat memengaruhi hidup masyarakat [5]. Pengambilan keputusan ini menjadi tinjauan yang penting disebabkan karena perempuan harus mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada orang lain.

Penelitian ini menggunakan teori Maxine Molyneux dan Marilyn Thomson, dengan indikator program CCT mampu memberdayakan sosial dan ekonomi perempuan; kebijakan ramah keluarga yang mengakui peran perempuan; dan kesetaraan yang lebih besar dengan melibatkan laki-laki dalam program. Serta teori Claudia Radel, Birgit Schmook, Nora Haenn, dan Lisa Green, dengan indikator perubahan dinamika rumah tangga dan potensi dampak positif terhadap pengeluaran rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan perempuan melalui kegiatan P2K2 dalam Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta dan diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan rujukan dalam membuat kebijakan berbasis gender dan development. Penelitian ini memiliki novelty dibandingkan dengan penelitian lain, yang dapat dilihat melalui fokus penelitian, yaitu menganalisis kebijakan PKH yang ditelaah melalui sudut pandang gender.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mendeskripsikan permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh, baik melalui data primer dari wawancara dengan narasumber maupun data sekunder dari publikasi jurnal, buku, dan website pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta, khususnya Kemantren Gondokusuman dan Gedongtengen. Penelitian dilakukan selama 3 bulan, yaitu dari bulan November hingga Desember 2023 dan Januari 2024.

Narasumber penelitian ini terdiri dari Koordinator PKH Kota Yogyakarta, pendamping PKH Kemantren Gondokusuman dan Gedongtengen, KPM PKH Kemantren Gondokusuman, dan KPM PKH Kemantren Gedongtengen. KPM PKH yang menjadi narasumber penelitian ini seluruhnya perempuan, baik itu perempuan yang bekerja di sektor publik maupun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi untuk mendapatkan gambaran dari pelaksanaan kegiatan P2K2 di Kota Yogyakarta. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber guna mengetahui proses pemberdayaan melalui kegiatan P2K2 dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPM perempuan dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga.

Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data (*triangulate data source*) dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, *member checking* dalam penelitian ini dengan mengambil kembali bagian dari hasil penelitian yang telah disunting atau setengah disunting, dan pengecekan rekan sejawat (*peer debriefing*) dengan melibatkan seseorang untuk mengulas dan mengajukan pertanyaan tentang penelitian yang dilakukan. *Peer debriefing*

dilakukan oleh dosen pembimbing. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder, kemudian reduksi data. Data wawancara yang ditulis dalam pembahasan dipilih sesuai dengan indikator yang digunakan. Setelah itu dilakukan data disajikan menggunakan kalimat narasi dipadukan dengan jurnal-jurnal terdahulu untuk memperkuat data dan opini. Kemudian, dilakukan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan dengan mengambil garis besar pada setiap indikator yang ditulis kembali dengan narasi yang lebih singkat.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dianalisis menggunakan lima indikator dari dua ahli, yaitu dari Maxine Molyneux dan Marilyn Thomson serta Claudia Radhel, Birgit Schmook, Nora Haen, dan Lisa Green.

3.1 Perubahan Dinamika Gender dalam Rumah Tangga

Perubahan dinamika gender dalam rumah tangga dipaparkan sebagai kondisi perempuan yang memperoleh akses secara independen terhadap sumber daya, perempuan tersebut dapat mencapai posisi tawar yang lebih baik [6]. Pada dasarnya, perempuan memiliki tugas dalam mendukung rumah tangga, walaupun masih ada anggapan bahwa pekerjaan perempuan hanya mengerjakan pekerjaan domestik saja. Juga sudut pandang masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki yang bekerja mencari nafkah telah melekat [7]. Berdasarkan temuan melalui adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemantren Gondokusuman menunjukkan bahwa bantuan ini memperkuat hubungan antara suami dan istri serta memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa istri memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan keputusan terkait dengan pengeluaran keluarga. Namun, pengelolaan keuangan dilakukan oleh istri sendiri tanpa campur tangan suami. Temuan ini sejalan dengan Studi Gender Model Sara Hlupekile Longwe dalam penelitian Anisa Desianti Ramadhani yang menyatakan bahwa memang bantuan PKH dapat menjadi lebih efisien ketika manajemen atau pengaturan dana sepenuhnya diserahkan kepada istri dalam keluarga, dimana sebuah program pemberdayaan akan mencapai derajat tertinggi atau berhasil melakukan pemberdayaan jika menyentuh pada tingkat kontrol. Hal tersebut menjadikan peran istri dalam manajemen rumah tangga semakin tinggi [8].

Temuan ini tidak sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Claudia Radel yang dikarenakan beberapa alasan. Pertama karakteristik informan, dimana beberapa dari mereka bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sebagian lagi memiliki usaha rumahan, tetapi KPM juga tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara penuh. Pekerjaan tersebut menjadikan istri tidak memiliki akses untuk bekerja di sektor publik sehingga posisi istri hanya mengerjakan pekerjaan domestik. Dari faktor tersebut sudah menjelaskan bahwa KPM di Kemantren Gondokusuman tidak melakukan pembagian kerja dalam rumah tangga, ketika suami dan istri memiliki beban pekerjaan yang sama. Selain itu KPM juga tidak mendapat akses untuk bekerja di sektor publik. Kedua, istri tidak memiliki posisi yang setara dalam rumah tangga. Posisi istri dalam rumah tangga yaitu melayani suami, anak, dan mengelola

keuangan, sehingga ia tidak memiliki kontrol atas pembagian peran dalam rumah tangga.

Sedangkan pada Kemantren Gedongtengen terdapat perubahan dinamika gender dalam rumah tangga. Perempuan semakin memperlihatkan eksistensinya di sektor publik. Hal tersebut terlihat pada banyaknya perempuan yang bekerja mencari pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak hanya itu, terdapat pula KPM perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan tetap mengerjakan pekerjaan domestik, sementara suaminya hanya malas-malasan. Perubahan tersebut dapat memunculkan kesenjangan dikotomis dalam peran gender yang tidak proporsional dan sangat merugikan perempuan. KPM di Gedongtengen telah mengalami perubahan yang dapat dilihat melalui status KPM yang bekerja untuk mencari pendapatan tambahan. Secara kultur, perempuan memiliki tugas untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Dalam kondisi KPM perempuan yang bekerja, pembagian peran dalam rumah tangga perlu dilakukan. Mengingat perempuan dan laki-laki menjadi memiliki waktu produktif yang sama.

Dalam subbab ini dapat disimpulkan bahwa, pada Kemantren Gondokusuman, cenderung tidak ada perubahan dinamika gender dalam rumah tangga. Sebagian besar KPM bekerja sebagai ibu rumah tangga, dimana mereka mengerjakan pekerjaan domestik secara penuh. Bahkan apabila suami tidak ikut membantu, KPM perempuan di Kemantren Gondokusuman dengan legawa menerimanya. Sedangkan di Kemantren Gedongtengen menunjukkan sebaliknya. KPM perempuan pada kemantren ini sebagian besar bekerja di sektor publik maupun membuka usaha sendiri. KPM tersebut tentu memiliki pendapatan sendiri yang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan kondisi demikian, suami KPM memiliki kesadaran untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan mengambil bagian dalam semua proses yang terlibat dalam rumah tangga.

3.2 Potensi Dampak Positif Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga

CCT memberikan dampak positif terhadap perempuan. Dampak tersebut dirasakan juga oleh anak perempuan dan dapat dilihat dalam bidang kesehatan, status gizi, serta pendaftaran sekolah. Teori tersebut menunjukkan bahwa *CCT* dapat memberikan dampak positif bagi rumah tangga miskin [9].

Temuan dari adanya PKH di Kemantren Gondokusuman mampu memberikan dampak positif terhadap pengeluaran rumah tangga. Hal ini selaras dengan tujuan dari pemberian bantuan PKH yang diharapkan mampu membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Temuan menunjukkan bahwa Bantuan Program Keluarga Harapan ini mampu membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga yang nantinya akan disesuaikan dengan komponen yang mereka dapatkan. Sebagian besar KPM memiliki latar belakang bekerja di bidang nonformal sehingga penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi secara keseluruhan kebutuhan pokok seperti pendidikan, dan konsumsi. Hal ini berdampak pada kekhawatiran akan keberlangsungan hidup mereka.

Seperti halnya dengan Kemantren Gondokusuman, KPM di Kemantren Gedongtengen juga merasakan dampak yang baik dari adanya bantuan PKH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPM PKH di Kemantren Gedongtengen memperoleh wawasan baru terkait pengelolaan keuangan. Wawasan tersebut

diperoleh melalui kegiatan P2K2 yang diikuti KPM setiap bulan yang menjadi kegiatan wajib dalam PKH. Kegiatan P2K2 di Kemantren Gedongtengen mampu mengajari KPM terkait bagaimana menggunakan uang dengan benar. Pendamping PKH Kemantren Gedongtengen menggunakan strategi untuk mengawasi penggunaan dana pada KPM melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban.

PKH terbukti mampu mengurangi beban rumah tangga KPM baik di Kemantren Gondokusuman maupun Gedongtengen. Dampak positif yang muncul dari PKH yaitu meringkankan pengeluaran dan membantu meringkankan kebutuhan sekolah serta kebutuhan sehari-hari [10]. Hal tersebut terlihat pada KPM yang merasa terbantu dalam membayar kebutuhan sekolah anak, terlebih KPM yang memiliki anak dan bersekolah di sekolah swasta. KPM merasa PKH dapat mengurangi beban tersebut, sehingga KPM tidak perlu menyisihkan uang untuk keperluan sekolah. Dimana aspek Pendidikan merupakan salah satu program komplementer yang berkelanjutan [11]. PKH juga membantu KPM dalam mengurangi pengeluaran memenuhi gizi anak, terutama balita. Hal tersebut karena balita termasuk komponen PKH dan layak untuk mendapatkan gizi seimbang melalui bantuan PKH.

3.3 Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Perempuan

Penerima CCT wajib menghadiri kegiatan yang diselenggarakan secara rutin [9]. Dalam teorinya Molyneux dan Thomson juga menjelaskan bahwa perempuan tertarik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga mampu membuat keputusan dan mendapatkan pengetahuan.

Kegiatan pemberdayaan di Kemantren Gondokusuman dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH di Kemantren Gondokusuman, salah satunya Pertemuan kelompok atau P2K2 yang rutin dilakukan sekali setiap bulan. Selain pertemuan kelompok yang menjadi agenda rutin dalam PKH, pendamping PKH di Kemantren Gondokusuman juga melakukan sinergi dan kolaborasi bersama dengan instansi terkait, seperti Kemenkumham terkait cara pendaftaran CV atau PT di AHU. Pendamping juga aktif membuat program-program untuk memberdayakan ekonomi KPM. Pemberdayaan dilakukan melalui sosialisasi tentang cara perencanaan usaha, kedua cara pengembangan usaha, ketiga cara pemasaran produk atau jasa usaha, serta yang terakhir cara pengelolaan usaha. pendamping memiliki channel atau relasi dengan SMA Karya Rini yang akan mengadakan pelatihan sibori dan pelatihan batik.

Sementara itu, pendamping PKH Kemantren Gedongtengen sudah tidak menjalin kerja sama lagi dengan instansi untuk memberikan pelatihan ekonomi kepada KPM PKH. Pendamping PKH Kemantren Gedongtengen memberikan pemberdayaan hanya ketika kegiatan P2K2 saja. Terlebih lagi, masih terdapat KPM PKH yang tidak dapat meningkatkan keterampilan berwirausahanya. Salah satu KPM PKH di Kemantren Gedongtengen memiliki keterampilan membuat buket bunga, tetapi sangat disayangkan KPM tersebut tidak mendapatkan pelatihan ekonomi dan kewirausahaan, sehingga tidak mampu memasarkan karyanya melalui media sosial, bahkan tidak mengetahui perencanaan usaha yang baik. Dalam satu kasus yang terjadi, membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi bagi KPM PKH penting untuk dilakukan.

Dinamika gender dalam PKH, baik pada Kemantren Gondokusuman dan Gedongtengen sesuai dengan teori Molyneux yaitu memberdayakan KPM dalam bidang sosial dan ekonomi. KPM diberdayakan karena mereka aktif mengikuti kegiatan P2K2 yang rutin diselenggarakan setiap bulan. Dengan mereka mengikuti kegiatan P2K2, KPM memperoleh pengetahuan dan wawasan baru. Biasanya pendamping memberikan materi P2K2 sesuai dengan modul P2K2. Modul tersebut diantaranya Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak, Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga, Modul Perlindungan Anak, dan Modul Kesejahteraan Sosial.

3.4 Kebijakan Ramah Keluarga yang Mengakui Peran Perempuan

CCT merupakan kebijakan yang mengakui peran perempuan. Hal tersebut karena CCT menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lebih kuat [9]. Posisi tersebut mampu meningkatkan kekuasaan perempuan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga. Keputusan yang dilakukan oleh perempuan terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran dalam rumah tangga. Pemberdayaan dalam PKH melihat seberapa besar KPM perempuan memiliki akses, partisipasi, dan kontrol dalam pembangunan [12].

KPM PKH Kemantren Gondokusuman memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan keuangan rumah tangga termasuk dana PKH. Kemampuan tersebut didorong oleh ada pemberdayaan yang dilakukan ketika kegiatan P2K2. Faktor keadaan suami yang bekerja dan terima beres terkait masalah keuangan menjadikan pengambilan keputusan pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh istri. Pelaksanaan PKH tidak sepenuhnya menjadikan peran perempuan menjadi sentral. Sebagai penerima PKH di Kemantren Gondokusuman justru masih melibatkan laki-laki dalam pengelolaan dana. Hal tersebut diperkuat dengan adanya temuan pengambilan keputusan pengelolaan dana PKH yang melibatkan laki-laki ditujukan sebagai bentuk komunikasi yang ada dalam ranah keluarga. Istri selaku KPM PKH mengkomunikasikan penggunaan dana yang akan digunakan untuk keperluan keluarga. PKH juga menjadi ramah keluarga karena memberikan pengetahuan dan mengajarkan ilmu kepada KPM dalam berinteraksi dengan keluarga.

PKH di Kemantren Gedongtengen juga mampu meningkatkan peran seorang istri dalam mengambil keputusan, terutama pengelolaan keuangan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu hal yang dapat memengaruhi kesejahteraan dalam keluarga [13]. Kemampuan pengambilan keputusan mereka peroleh dari pertemuan kelompok yang rutin dilakukan setiap bulan. Pengambilan keputusan KPM juga dipengaruhi oleh kompleksitas program, seperti PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara), UEP (Usaha Ekonomi Produktif), dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KPM PKH Kemantren Gedongtengen dalam menggunakan dana PKH sesuai dengan komponennya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan KPM bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Pengambilan keputusan yang dilakukan KPM di Kemantren Gedongtengen juga terkait keputusan untuk bekerja di sektor publik. Keputusan yang mereka ambil harus sudah didiskusikan dengan suami. Meskipun hal tersebut terkesan menjadi peran ganda seorang perempuan, tetapi dengan pengambilan keputusan

dipegang oleh perempuan, perempuan juga memiliki kuasa dalam keluarga. Harapannya, KPM mampu mendapatkan sumber pendapatan dengan membangun usaha atau menyalurkan kreatifitas yang dapat menghasilkan pendapatan [14].

3.5 Kesetaraan yang Lebih Besar dengan Melibatkan Laki-laki dalam Program

Program CCT tidak membantu perempuan mengatasi pembagian kerja yang tidak setara berdasarkan gender dalam rumah tangga. Kondisi terkait penerimaan bantuan dan pengelolaan uang, umumnya meningkatkan pekerjaan perempuan dan tidak mendorong keterlibatan laki-laki. Sehingga partisipasi laki-laki sangat minim dalam pelaksanaan program [9].

PKH memang menempatkan perempuan sebagai penerima bantuan, yang merupakan inisiasi pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan rumah tangga [15]. Pada Kemantren Gondokusuman sendiri, perempuan yang menjadi KPM PKH menyebabkan peran laki-laki dalam mengelola dana bantuan PKH juga minim. Bahkan untuk pekerjaan rumah tanggapun, laki-laki jarang terlibat. Hal tersebut karena suami atau laki-laki fokus pada pekerjaannya di sektor publik, entah itu buruh, kuli, dan sebagainya, sehingga perempuan atau istri enggan untuk membebankan pekerjaan rumah tangga kepada suami. Namun, untuk kegiatan sosial di masyarakat beberapa suami KPM masih berkontribusi dengan mengikuti pertemuan di masyarakat, meskipun masih ada suami dari KPM yang tidak aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Suami yang bekerja di sektor publik menjadikan perannya dalam mengelola bantuan PKH menjadi minim.

Kemantren Gedongtengen, partisipasi laki-laki dalam kegiatan PKH juga minim. Meskipun demikian, pemberian materi komunikasi dan interaksi dalam rumah tangga saat P2K2 mendorong suami untuk terlibat dalam pengelolaan PKH dalam rumah tangga. Walaupun tidak dominan, tetapi peran tersebut cukup membantu istri dalam menggunakan bantuan PKH, sehingga ketika terdapat masalah dalam penggunaan bantuan, dapat diselesaikan secara bersama-sama. Pada Kemantren Gedongtengen, terdapat pembagian kerja dalam rumah tangga. dimana pendamping PKH membantu RTSM yang memiliki ketidakmampuan dalam mencapai haknya, sehingga perlu pendampingan bagi RTSM untuk meraih hak yang pantas RTSM dapatkan melalui PKH

Peran suami dalam implementasi PKH hanya sebatas mengantar istri mencairkan dana, mengetahui penggunaan dana, dan tempat konsultasi istri untuk menggunakan dana bantuan PKH. Pengelolaan dana bantuan PKH memang ditujukan kepada perempuan atau istri, tetapi ketika mengimplementasikan program di dalam keluarga masing-masing diharapkan terdapat kerja sama antara istri dengan suami. Kerja sama dari SDM PKH akan menjadi kunci yang dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi dalam mengelola program dan kegiatan. Perempuan dianggap mampu dalam mengelola keuangan rumah tangga, sehingga diharapkan aspek kesehatan dan pendidikan penerima bantaun dapat ditingkatkan [16].

4. Kesimpulan

Dinamika gender dalam Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta dapat dilihat melalui lima indikator, yaitu perubahan dinamika gender dalam rumah tangga, potensi dampak positif terhadap pengeluaran rumah tangga, pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan, kebijakan ramah keluarga yang mengakui peran perempuan, dan kesetaraan yang lebih besar dengan melibatkan laki-laki dalam program. Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika gender dalam PKH di Kota Yogyakarta tidak mengubah peran gender dalam rumah tangga secara keseluruhan, selain itu PKH mampu memberikan dampak positif dalam rumah tangga dan memberikan pemberdayaan baik sosial maupun ekonomi kepada KPM melalui kegiatan P2K2, meskipun partisipasi laki-laki dalam program sangat minim.

Penelitian ini menunjukkan data yang variatif pada indikator pertama dan ketiga karena perbedaan data masing-masing kemantren disetiap indikator, dimana pada indikator pertama Kemantren Gondokusuman mengalami perubahan dinamika gender dalam rumah tangga sementara Kemantren Gedongtengen tidak mengalami. Pada indikator ketiga data yang variatif menunjukkan bahwa Kemantren Gondokusuman aktif mengadakan pelatihan diluar kegiatan P2K2, sementara Kemantren Gedongtengen hanya mengandalkan kegiatan P2K2 sebagai sarana pemberdayaan. Pada indikator kedua menunjukkan data yang sama pada kedua kemantren, yaitu PKH memberikan dampak positif pada kedua kemantren melalui pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak. Sementara itu, indikator keempat KPM PKH pada kedua kemantren mampu dalam mengambil keputusan, yaitu keputusan mengelola anggaran dan bekerja di sektor publik, serta indikator kelima, peran laki-laki sangat minim dalam pelaksanaan PKH pada kedua kemantren yang terlihat sangat minim.

Penelitian ini terbatas pada analisis data yang narasumbernya sebagian besar perempuan yang memiliki suami. Proses pengambilan keputusan dilakukan perempuan dengan mempertimbangkan adanya suami, sehingga tidak banyak sudut pandang yang peneliti peroleh dari perempuan yang berstatus sebagai janda yang menjadi kepala keluarga. Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya, perlu menambahkan kepala keluarga perempuan sebagai narasumber penelitian, supaya memperoleh sudut pandang yang lebih luas dan mendalam dari narasumber.

Referensi

- [1] BPS Kota Yogyakarta (2022). Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta September 2022. Diakses pada 7 Februari 2023 pada laman <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/1351/profil-kemiskinan-d-i--yogyakarta-september-2022.html>
- [2] Zahrawati, F. (2020). Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan. *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i1.1327>
- [3] Utomo, K. S., & Haryani, T. N. (2019). Mengurai Feminisasi Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 15–23.
- [4] Novianti, & Sari, N. I. (2023). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan untuk Mengentaskan Kemiskinan di Desa Lumbang Dusun Penyengat Kecamatan Sambas. *Sosiosaintika*, 1(2), 71–82. <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v1i2.138>

- [5] Malik, S. E. H., Nurmanto, A., Putra J, M., & Saputro A, A. (2023). Analisis Efisiensi Birokrasi dalam Administrasi Publik : Tinjauan Terhadap Proses Pengambilan Keputusan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 232–237.
- [6] Radel, C., Schmoock, B., Haenn, N., & Green, L. (2017). The gender dynamics of conditional cash transfers and smallholder farming in Calakmul, Mexico. *Women's Studies International Forum*, 65, 17–27. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2016.06.004>
- [7] Juita, F., Mas`ad, M., & Arif, A. (2020). Peran Perempuan Pedagang Sayur Keliling Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 100. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2916>
- [8] Desianti, A, dan Sri Yuliani. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten (Studi Gender Model Sara Hlupekile Longwe). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*. 2(2). 390-408.
- [9] Molyneux, H. M., & Thomson, M. (2020). Peru , Ecuador in Bolivia Peru , equity Ecuador and and women ' s Bolivia I Cash empowerment gender. 19(2), 195–212.
- [10] Saib, N. N. W., Fitri Kurnianingsih, & Okparizan. (2022). Analisis Dampak Ekonomi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. *Regalia: Jurnal Riset Gender Dan Anak*, 1(1), 39–47. <https://doi.org/10.31629/jga.v1i1.4419>
- [11] Khalifah, S. N., & Basar, G. G. K. (2023). Peran Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Anak Sekolah Dasar. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 143. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.39445>
- [12] Arifin, I. P., Retno Wulan, T., & Lestari, S. (2021). Perempuan dan Bantuan Sosial (Studi Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan). *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12), 2317–2335. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.360>
- [13] Pical, V. J., Nanlohy, H., & Saiful. (2020). Peran gender dan pengambilan keputusan rumah tangga perikanan purse seine di kabupaten maluku tengah. *Jurnal IPTEKS*, 7(14), 74–88. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/iptekspsp/article/view/9665%0Ahttps://journal.unhas.ac.id/index.php/iptekspsp/article/download/9665/5857>
- [14] Beni, S., Manggu, B., Tinggi, S., Manajemen, I., & Bhuana, S. (2018). Program Keluarga Harapan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha.. *JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi*. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE>
- [15] Saragih, D. E., Sekarningrum, B., & Fedryansyah, M. (2023). Strukturasi pada Perempuan dan Perannya Dalam Mengelola Bantuan PKH. 3, 1046–1059.
- [16] Hanif, H., Fatimah, D., Zubaedah, A., Juhriati, Suvianita, K., Adhi, W., & Maci, Z. (2020). Mewujudkan program keluarga harapan (pkh) yang lebih bermakna: analisa gender terhadap implementasi pkh di kabupaten sidoarjo (jawa timur) dan kabupaten bima (nusa tenggara barat). In *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora* (Vol. 2, Issue 1). <http://eprints.untirta.ac.id/833/%0Ahttp://etd.eprints.ums.ac.id/14871/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.025%0Ahttp://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf%0Ahttp://www.who.int/about/licensing/%0Ahttp://jukeunil>